

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengendalian Internal**

Menurut Institut Akuntansi Publik Indonesia (2011) sistem pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atau tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, penggunaan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati.walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengawasan intern merupakan proses yang mencakup kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi bertujuan memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, tujuan dari pengendalian

intern yaitu pengendalian intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

Tujuan penyelenggaraan tersebut adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif. Selain itu, pembinaan penyelenggaraan SPIP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 diselenggarakan dengan cara :

- a. Sosialisasi SPIP;
- b. Pendidikan & Pelatihan SPIP;
- c. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
- d. Pembimbinga & Konsultasi SPIP;
- e. Peningkatan kompetensi auditor APIP.

Dalam hal pencapaian keberhasilan dalam penerapan pengendalian intern maka harus diperhatikan juga unsur-unsur pengendalian intern. Beberapa unsur pengendalian intern menurut Permendagri Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

#### 1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

## 2. Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan instansi pemerintahan menetapkan :

### a. Tujuan Instansi Pemerintah

Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

### b. Tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah
2. Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya
3. Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah
4. Mengandung unsur kriteria pengukuran
5. Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup
6. Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

## 3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri atas :

- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d. Pengendalian fisik atas aset

- e. Penetapan dan reuiu atas indikator dan ukuran kinerja
- f. Pemisahan fungsi
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi pemerintah
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko
- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah
- d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
- e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis
- f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

#### 5. Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui :

a. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengolahan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

b. Evaluasi Terpisah

1. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
2. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.
3. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit dan Reviu Lainnya.

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

Disamping itu, menurut *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO) yang dikutip Mukhsan (2008) menyatakan bahwa terdapat lima unsur atau elemen pengendalian internal yang saling berhubungan, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*);
2. Penilaian resiko (*risk assessment*);
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*);
4. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*);
5. Pemantauan (*monitoring*).

Mulyadi (2001: 163), “mendefinisikan sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.”

Menurut Tuanakotta (2014:127), tujuan pengendalian internal secara garis besarnya dapat dibagi menjadi empat kelompok, sebagai berikut:

1. Strategi, sasaran-sasaran utama (high-level goals) yang mendukung misi entitas.
2. Pelaporan Keuangan (pengendalian internal atas pelaporan keuangan).
3. Operasi (pengendalian operasional atau operational controls).
4. Kepatuhan terhadap perundang-undangan. Hukum dan ketentuan-ketentuan

Berdasarkan dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern terdiri dari beberapa unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya dan pengendalian internal merupakan suatu proses yang berisikan kebijakan dan prosedur yang dirancang oleh manajemen untuk memastikan pelaporan keuangan yang andal dan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku.

### **2.1.2. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2013 pasal 1, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjelaskan:

“Sertifikasi kompetensi kerja sebagai suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan atau Internasional”

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 A Tahun 2003 menjelaskan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa:

1. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu fakta dan angka dibalik aspek teknis.
2. Keahlian/Keterampilan (*skill*), yaitu kemampuan untuk menunjukkan tugas pada tingkat kriteria yang dapat diterima secara terus menerus dengan kegiatan yang paling sedikit/

3. Sikap (*Attitude*), yaitu yang ditunjukkan kepada orang lain bahwa yang bersangkutan mampu berada dalam lingkungan kerjanya.

Spencer dan Spencer (1993) menjelaskan bahwa karakteristik kompetensi (*core competency*) dasar seseorang yang terdiri dari:

1. Pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki seseorang di bidang tertentu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dengan pengetahuan yang sesuai dengan pekerjaannya maka diharapkan mampu untuk menyelesaikan tugasnya dalam kondisi apapun. Pengetahuan akan berpengaruh terhadap teknik-teknik dan strategi yang digunakan untuk mencapai kinerja yang baik dalam organisasi. Sama halnya seperti pengetahuan manajemen sumber daya manusia, pemberdayaan, dan lainnya yang bersifat teoritis.
2. Keterampilan merupakan kemampuan dan keahlian seseorang dalam menyelesaikan tugasnya dengan baik, sepertihalnya menentukan konsep yang baik untuk dapat menyelesaikan masalah, mengakumulasikan teknik-teknik yang dapat dipakai dalam suatu kondisi tertentu.
3. Sikap/Watak merupakan perilaku seseorang yang ditampakan dalam merespon segala hal yang terjadi. Watak berkaitan dengan sifat emosional yang ada dalam diri seseorang, sepertihalnya kemampuan dalam mengontrol dirinya didalam kondisi tertentu. Watak seseorang akan berpengaruh kepada motif yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugasnya.
4. Motif merupakan pemikiran mendasar yang muncul dari dalam diri seseorang dan menjadi tujuan serta keinginan yang ingin dicapai dalam organisasi secara pribadi akan berdampak pada tindakan-tindakan yang dilakukannya.
5. Konsep Diri merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk meyakinkan dirinya, mendorong dirinya untuk bekerja dan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Konsep diri yang dimiliki seseorang berkaitan dengan apa yang mendorong seseorang untuk melakukan tugasnya dengan baik serta apa yang dimiliki seseorang dan menjadi nilai lebih dari individu-individu yang lain.

### **2.1.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa sebuah situs memiliki cara untuk menampilkan profil pemerintah daerah di internet bertujuan untuk menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan terbaru, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menerima masukan dari masyarakat. Selain akses profil pemerintah daerah yang terkait, dalam situs resmi tersebut masyarakat dapat mengakses mengenai informasi keuangan pemerintah daerah. Hal ini diatur dalam PP No. 56 tahun 2005 bahwa penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diinformasikan

melalui situs resmi pemerintah daerah dan bertujuan untuk menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menerima masukan dari masyarakat.

Menurut Sholeh (2017), “Indikator Mengukur Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah tingkat integritas informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi”. pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan indikator: Perangkat, merupakan indikator untuk menggambarkan kelengkapan yang mendukung terlaksananya penggunaan teknologi informasi, meliputi perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan, dua Pengelolaan Data Keuangan, merupakan indikator untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data keuangan secara sistematis dan menyeluruh., tiga Perawatan, merupakan indikator untuk menggambarkan adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur terhadap perangkat teknologi informasi guna mendukung kelancaran pekerjaan.

Menurut Jurnal dan Supomo (2002) dalam Harifan (2009), pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi yang terdiri dari:

1. Bagian ekonomi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas.
2. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja.
3. Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.
4. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputersasi.
5. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* sesuai dengan peraturan perundangundangan.
6. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi.
7. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.
8. Peralatan yang usang/rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah penggunaan teknologi informasi yang tepat akan bisa mendukung terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas karena pemanfaatan teknologi informasi juga akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi salah satunya yaitu ketepatanwaktuan.

#### **2.1.4. Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi- transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban pengelolaan terhadap pengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang disusun dan diterbitkan harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Menurut Bastian (2010: 96), “laporan keuangan merupakan representasi posisi keuangan terhadap transaksi- transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas”.

Menurut PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan. Tujuan penyusunan laporan keuangan pada PP No.71 Tahun 2010 paragraf 23 disebutkan bahwa, laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggung jawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Adapun laporan keuangan dapat dikatakan sudah berkualitas jika bias memenuhi beberapa syarat karakteristik-karakteristik kualitas sesuai PP No.71 Tahun 2010, yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan biasanya dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

2. Andal

Laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi-informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara, jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan

batas pemahaman para pengguna Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2009) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Dapat disimpulkan bahwa pengertian laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atau dibuat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan tersebut didalamnya mencakup semua posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dibuat oleh suatu entitas akuntansi. Entitas akuntansi dilingkup pemerintah pusat yaitu setiap kuasa pengguna anggaran (KPA) di lingkungan suatu kementerian negara/lembaga. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut IAI (2009) yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah dikatakan baik apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Laporan keuangan memiliki keempat karakteristik kualitatif yaitu: 1) relevan, yang berarti informasi laporan keuangan yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantunya dalam melakukan evaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi di masa yang akan datang 2) andal, yang berarti penyajian informasi laporan keuangan tersebut dapat memenuhi syarat harus bebas serta tak terikat dengan pengertian yang salah maupun menyesatkan (salah penyajian), kemudian dapat menampilkan berbagai fakta yang ada secara jelas dan jujur, serta informasi yang telah di sesuaikan dengan ketentuan yang ada 3) dapat dibandingkan, yang berarti dapat membandingkan laporan keuangan periode saat ini dengan sebelumnya serta bisa dilakukan perbandingan terhadap laporan

keuangan entitas lain 4) dapat dipahami, yang berarti informasi di dalam laporan keuangan tersebut mampu menginterpretasikan apa yang terdapat di laporan keuangan sehingga mudah dipahami serta dimengerti oleh penggunanya atau stakeholders terkait.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan dan referensi terkait dengan Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (Studi Pada PDAM Tirta Musi Kota Palembang). Beberapa penelitian terdahulu disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian>Nama Penulis (Tahun)	Variabel Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Instansi Pemerintah yang Berstatus Badan Layanan Umum di Provinsi Lampung Tahun 2020  Yana Marisa,Defrizal,Hendri Dunan (2020)	<b>X1</b> : Kompetensi Sumber Daya Manusia <b>X2</b> : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah <b>X3</b> : Standar Akuntansi Pemerintahan <b>X4</b> : Pemanfaatan Teknologi Informasi <b>Y</b> : Kualitas Laporan Keuangan	Meneliti Menggunakan : • Variabel X : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi • Variabel Y : Kualitas Laporan Keuangan	• Variabel X yang Berbeda : Standar Akuntansi Pemerintahan • Objek Penelitian yaitu BLUD kota Palembang sehingga berbeda dengan objek penelitian terdahulu	Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pemanfaatan Teknologi Informasi masing-masing secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di Provinsi Lampung
2	Pengaruh Penerapan Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia	<b>X1</b> : Sistem Pengendalian Intern	Meneliti Menggunakan : • Variabel X : Penerapan	• Objek Penelitian yaitu BLUD kota Palembang sehingga	pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas

	terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung) Tahun 2018  M Alvin Prabu Agung (2018)	<b>X2</b> : Kompetensi Sumber Daya Manusia	Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia • Variabel Y : Kualitas Laporan Keuangan	berbeda dengan objek penelitian terdahulu	laporan keuangan badan layanan umum daerah (Studi pada RSUD Kayuagung)
3	Pengaruh Pelaksanaan Anggaran, Komitmen Organisasi, Penerapan Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di BUMD Kabupaten Gianyar  Novitasari, Dewa Ayu Ketut Mega (2022)	<b>X1</b> : Anggaran <b>X2</b> : Komitmen Organisasi <b>X3</b> : Pengendalian Intern <b>X4</b> : Pemanfaatan Teknologi Informasi <b>X5</b> : Kualitas Sumber Daya Manusia <b>Y</b> : Kualitas Laporan Keuangan	Meneliti Menggunakan : • Variabel X : Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, • Variabel Y : Kualitas Laporan Keuangan	• Variabel X yang Berbeda : Anggaran, Komitmen Organisasi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia • Objek Penelitian yaitu BLUD kota Palembang sehingga berbeda dengan objek penelitian terdahulu	Penerapan pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
4	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas	<b>X1</b> : Sistem Pengendalian Internal	Meneliti Menggunakan : • Variabel X :	• Objek Penelitian yaitu BLUD kota Palembang sehingga	Pengujian statistik memperlihatkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas

	Laporan Keuangan Pada PDAM Tirta Wening Kota Bandung  Putri Andriani , Abin Suarsa ,Yuniati (2019)	<b>Y</b> : Kualitas Laporan Keuangan	Sistem Pengendalian Intern  • Variabel Y : Kualitas Laporan Keuangan	berbeda dengan objek penelitian terdahulu	laporan keuangan di PDAM Tirtawening Kota Bandung
5	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Puskesmas BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang  Uan Wismoyo, Juliana Nasution (2022)	<b>X1</b> : Kompetensi Sumber Daya Manusia <b>X2</b> : Teknologi Informasi <b>Y</b> : Kualitas Laporan Keuangan	Meneliti Menggunakan : • Variabel X : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi Variabel Y : Kualitas Laporan Keuangan	• Objek Penelitian yaitu BLUD kota Palembang sehingga berbeda dengan objek penelitian terdahulu	masing-masing variabel menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penggunaan teknologi informasi tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan Puskesmas.
6	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus	<b>X1</b> : Sistem Informasi Akuntansi <b>X2</b> : Sistem Pengendalian Internal <b>X3</b> : Kompetensi Staf Akuntansi	Meneliti Menggunakan : • Variabel X : Sistem Pengendalian Internal • Variabel Y : Kualitas	• Variabel X yang Berbeda : Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Staf Akuntansi	Menunjukkan bahwa variabel sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

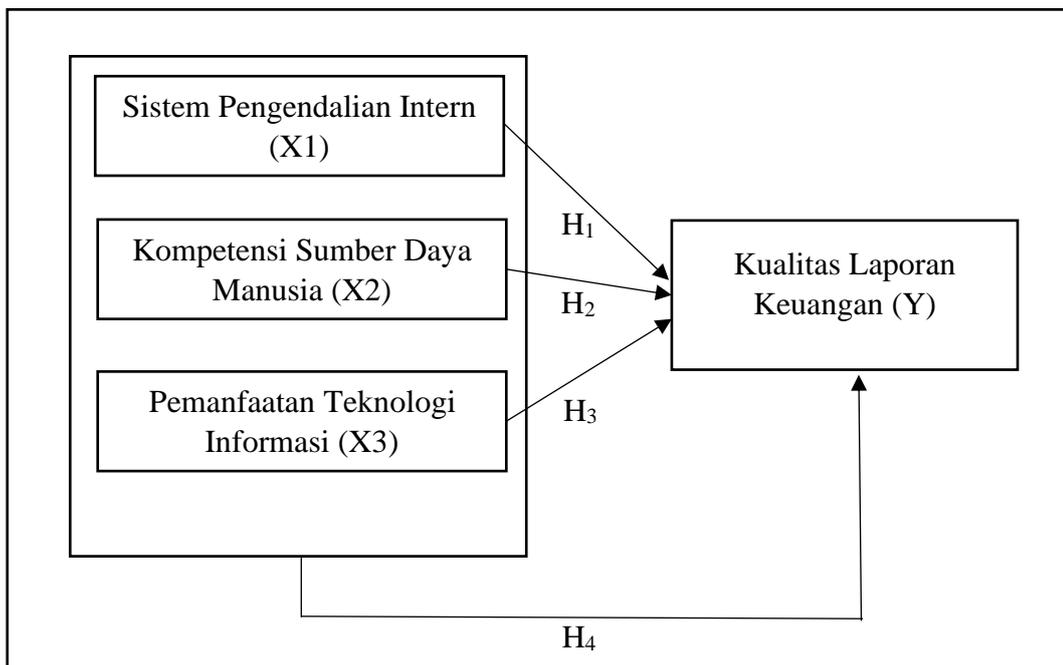
	<p>Pada Puskesmas Se-Kabupaten Tabalong)</p> <p>Siti Nur Aisah, Nova Abriano, Nurfadila Dwi Hidayati (2022)</p>	<p><b>Y</b> : Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>Laporan Keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objek Penelitian yaitu BLUD kota Palembang sehingga berbeda dengan objek penelitian terdahulu</li> </ul>	
7	<p>Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru).</p> <p>Sarlota Faturey, Nicolas Ahuluheluw, Ferry Hendro Basuki (2021)</p>	<p><b>X1</b> : Standar Akuntansi Pemerintah  <b>X2</b> : Sistem Pengendalian Internal  <b>X3</b> : Kualitas SDM  <b>Y</b> : Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>Meneliti Menggunakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel X : Sistem Pengendalian Internal</li> <li>Variabel Y : Kualitas Laporan Keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel X yang Berbeda : Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas SDM</li> <li>Objek Penelitian yaitu BLUD kota Palembang sehingga berbeda dengan objek penelitian terdahulu</li> </ul>	<p>Pada Variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</p>
8	<p>Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas</p>	<p><b>X1</b> : Kompetensi Sumber Daya Manusia  <b>X2</b> : Pemanfaatan Teknologi</p>	<p>Meneliti Menggunakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel X : Kompetensi Sumber Daya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objek Penelitian yaitu BLUD kota Palembang sehingga berbeda dengan</li> </ul>	<p>Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo dan Biro Layanan Informasi dan Komunikasi serta Pemanfaatan</p>

	<p>Laporan Keuangan (studi kasus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo dan Biro Layanan Informasi dan Komunikasi)</p> <p>Nabila Zubaidi, Dwi Cahyono, Astrid Maharani (2019)</p>	<p><b>Y</b> : Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>Manusia, Pemanfaatan Teknologi</p> <p>• Variabel Y : Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>objek penelitian terdahulu</p>	<p>Teknologi Informasi mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo dan Biro Layanan Informasi dan Komunikasi.</p>
9	<p>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Emilda Nur Safiri, Pingky Dezar Zulkarnain (2020)</p>	<p><b>X1</b> : Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p><b>X2</b> : Sistem Pengendalian Internal</p> <p><b>X3</b> : Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p><b>Y</b> : Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>Meneliti Menggunakan :</p> <p>• Variabel X : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>Variabel Y : Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>• Objek Penelitian yaitu BLUD kota Palembang sehingga berbeda dengan objek penelitian terdahulu</p>	<p>Melihat uji T menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.</p>

10	Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Limapuluh Kota)	<b>X1</b> : Kompetensi Sumber Daya Manusia <b>X2</b> : Pemanfaatan Teknologi Informasi <b>X3</b> : Sistem Pengendalian Intern <b>Y</b> : Kualitas Laporan Keuangan	Meneliti Menggunakan : • Variabel X : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi , Sistem Pengendalian Intern Variabel Y : Kualitas Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objek Penelitian yaitu BLUD kota Palembang sehingga berbeda dengan objek penelitian terdahulu</li> </ul>	Variabel kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
----	---	---	---	---	--

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013:60), “kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian ini disajikan pada gambar 2.1.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.4. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:64), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Dikatakan sementara, karena jawaban diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.

### **2.4.1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan**

#### **Keuangan**

Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Menurut Mahmudi (2007:27), “Sistem akuntansi didalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah”. Dalam Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemda (2008: 14) dikatakan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut dapat terwujud jika entitas pemerintah daerah dapat menciptakan, mengoperasikan serta memelihara Sistem Pengendalian Intern yang memadai.

Berdasarkan peneliti Alvin., (2018) dan Putri *et al.*, (2019) menyatakan bahwa system pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi system pengendalian intern pada entitas maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

### **2.4.2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

SDM merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent*. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan. Menurut Sugeng dan Imam (2000), Organisasi dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi. Meskipun sistem akuntansi sudah dijalankan dengan baik, tetapi sumber daya manusia tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakannya, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi

akuntansi yang ada dan akhirnya informasi akuntansi tersebut kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai. Kompetensi sumberdaya manusia yang memadai dari segi kualitas dan kuantitatif akan meningkatkan kualitas nilai informasi dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan peneliti Nabila *et al.*, (2019) dan Uan *et al.*, (2022) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kompetensi sumber daya manusia yang memadai maka akan berpengaruh baik terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

#### **2.4.3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan menjelaskan pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam peningkatan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Pada dasarnya, teknologi informasi dapat berpengaruh terhadap sistem akuntansi, perubahan proses bisnis dan bukti yang tersedia untuk mendukung transaksi bisnis. Pemanfaatan teknologi informasi digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang akan meningkatkan kualitas informasi dari suatu laporan keuangan.

Berdasarkan peneliti Yana *et al.*, (2020) dan Novitasari *et al.*, (2022) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dari penelitian tersebut, maka pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **2.4.4. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah variabel Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hubungan antara Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Kualitas Laporan Keuangan, sehingga dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H4: Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.